



# PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

*Bagi 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Riau & Kepulauan Riau*

Batam, 5-7 Juli 2019



**SUNARTO**

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Non Judisial



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 794 /M AA.05/2018 31 Desember 2018  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2018

Yth. Ketua Mahkamah Agung ✓  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperoleh nilai 69,10 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Mahkamah Agung sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2017	2018
a. Perencanaan Kinerja	30	21,35	21,94
b. Pengukuran Kinerja	25	16,29	16,72
c. Pelaporan Kinerja	15	11,00	11,00
d. Evaluasi Internal	10	6,03	7,28
e. Capaian Kinerja	20	10,03	12,16
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,70</b>	<b>69,10</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

# HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2018



# DASAR HUKUM EVALUASI AKIP

## DASAR HUKUM

01

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
3. PERMENPAN RB NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI SAKIP



02

GOAL

## TUJUAN

UNTUK MENILAI TINGKAT AKUNTABILITAS ATAU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HASIL (*OUTCOME*) TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL (*RESULT ORIENTED GOVERNMENT*)



# HASIL EVALUASI SAKIP

03

- Excellent
- Good
- Satisfactory
- Poor

## HASIL

- ✓ MAHKAMAH AGUNG MEMPEROLEH **NILAI 69,10** DARI SKALA **100** ATAU **PREDIKAT "B"**.
- ✓ PENILAIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJANYA, KUALITAS PEMBANGUNAN BUDAYA KINERJA BIROKRASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA HASIL DI MAHKAMAH AGUNG SUDAH MENUNJUKKAN **HASIL YANG BAIK**.



# PERBANDINGAN PENILAIAN SAKIP MA 2017 DAN 2018

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2017	NILAI 2018	KETERANGAN NAIK/TURUN
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	21,35	21,94	↑ NAIK : 0,59
B.	PENGUKURAN KINERJA	25	16,29	16,72	↑ NAIK : 0,43
C.	PELAPORAN KINERJA	15	11,00	11,00	= SAMA
D.	EVALUASI INTERNAL	10	6,03	7,28	↑ NAIK : 1,25
E.	CAPAIAN KINERJA	20	10,03	12,16	↑ NAIK : 2,13
	<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>	<b>100</b>	<b>64,70</b>	<b>69,10</b>	<b>↑ NAIK : 4,4</b>
	<b>TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	

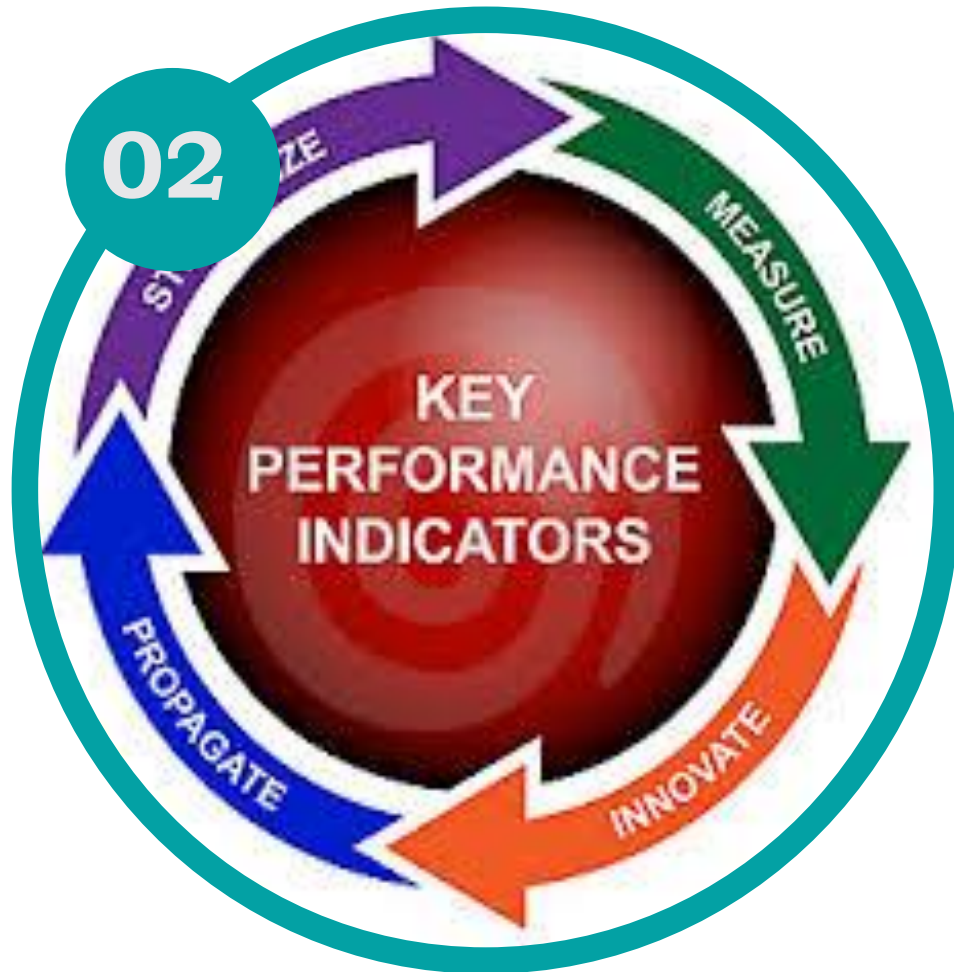


## IMPLEMENTASI SAKIP MA CUKUP BAIK

01

HAL INI TERCERMIN DARI TUJUAN DAN SASARAN DI LEVEL **MAHKAMAH AGUNG** DAN **UNIT ESELON I** YANG TELAH:

- ✓ BERORIENTASI HASIL (*OUTCOME*)
- ✓ ADANYA *CASCADE* INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SECARA BERJENJANG MULAI TINGKAT **MAHKAMAH AGUNG** SAMPAI PADA **PENGADILAN TINGKAT BANDING** DAN **TINGKAT PERTAMA**



## MA TELAH MELAKUKAN REVIU IKU

REVIU IKU TERSEBUT DIGUNAKAN  
DALAM :

- ✓ PERENCANAAN
- ✓ PENGANGGARAN
- ✓ PENGUKURAN
- ✓ PELAPORAN, DAN
- ✓ EVALUASI INTERNAL



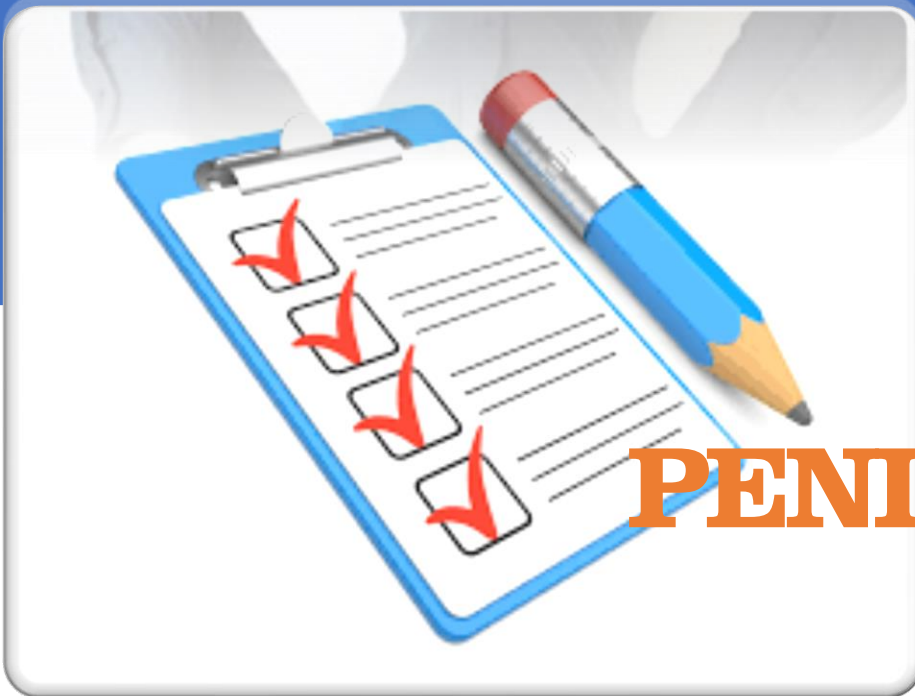


## MA TELAH MELAKUKAN KETERBUKAAN INFORMASI

03



- ✓ KETERBUKAAN INFORMASI DILAKUKAN MELALUI *WEBSITE* MILIK MA DAN UNIT KERJA DI BAWAHNYA.
- ✓ DALAM *WEBSITE* TERSEBUT TERDAPAT MENU KHUSUS BERUPA SAKIP YANG ISINYA TENTANG :
  - RENSTRA
  - PERJANJIAN KINERJA
  - INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN
  - LAPORAN KINERJA



# TUJUH

HAL YANG

# PERLU

DIPERHATIKAN

UNTUK

**PENINGKATAN**

# AKIP



# PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP

01



## RENCANA STRATEGIS

PADA RENSTRA UNIT ORGANISASI ESELON I **BELUM SEPENUHNYA** BERORIENTASI HASIL (*OUTCOME*) **DAN BELUM SEPENUHNYA** DILENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA ATAS TUJUAN YANG DITETAPKAN

02



## PERJANJIAN KINERJA

**TELAH** DILAKUKAN SECARA BERJENJANG **NAMUN BELUM MENYELURUH** HINGGA TINGKAT UNIT KERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, **DAN BELUM** DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (SKP)



# PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP

03



MONEV

## PENGUKURAN KINERJA

**TELAH** DILAKUKAN SECARA BERKALA MELALUI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN, **AKAN TETAPI BELUM** BERFOKUS PADA *OUTPUT* KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN

04

SIPP

SISTEM INFORMASI  
PELUSURAN PERKARA

## SIPP BELUM TERINTEGRASI DENGAN SAKIP

MA **TELAH** MEMILIKI SIPP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT DATA DAN INFORMASI TENTANG KINERJA PENANGANAN PERKARA DARI TINGKAT PERTAMA HINGGA BANDING, **NAMUN** SISTEM INI BELUM TERINTEGRASI DENGAN SAKIP



# PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PENINGKATAN AKIP

05



## LAPORAN KINERJA

- ✓ LAPORAN KINERJA DI TINGKAT UNIT KERJA **TELAH MENYAJIKAN**:
  - ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
  - PERBANDINGAN DATA KINERJA TAHUN BERJALAN DAN SEBELUMNYA
- ✓ **NAMUN BELUM MENYAJIKAN** ANALISIS YANG MENDALAM MENGENAI :
  - KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
  - SEHINGGA BELUM OPTIMAL DIGUNAKAN UNTUK UMPAN BALIK PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN

06



## KUALITAS EVALUASI PROGRAM

- ✓ **MASIH** BERFOKUS PADA :
  - CAPAIAN OUTPUT DAN
  - PENYERAPAN ANGGARAN,
- ✓ **DAN BELUM FOKUS** PADA :
  - ANALISIS KETERKAITAN KAUSALITAS ANTARA KEGIATAN-KEGIATAN DENGAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA, DAN
  - SASARAN PROGRAM YANG AKAN DICAPAI OLEH ORGANISASI



## TINGKATKAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWASAN **PERLU DITINGKATKAN**, HAL INI TERKAIT MASIH ADANYA REKOMENDASI-REKOMENDASI YANG **BELUM DITINDAKLANJUTI** OLEH UNIT-UNIT KERJA.



# DELAPAN REKOMENDASI MENPAN RB







# 8 REKOMENDASI MENPAN RB



## **TINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KINERJA**

**MENINGKATKAN  
KUALITAS LAPORAN  
KINERJA PADA UNIT  
KERJA DAN  
MEMANFAATKANNYA  
UNTUK UMPAN BALIK  
PERBAIKAN SECARA  
BERKELANJUTAN**



## **TINGKATKAN KUALITAS EVALUASI PROGRAM**

**MENINGKATKAN  
KUALITAS EVALUASI  
PROGRAM YANG  
FOKUS PADA  
ANALISIS CAPAIAN  
KINERJA DAN  
KETERKAITAN  
KAUSALITAS  
KEGIATAN DAN  
PROGRAM**



## **TINDAK LANJUTI HASIL EVALUASI BAWAS**

**MENDORONG UNIT KERJA  
UNTUK  
MENINDAKLANJUTI HASIL  
EVALUASI  
AKUNTABILITAS YANG  
DILAKUKAN OLEH BADAN  
PENGAWASAN**



## **DORONG PENINGKATAN KUALITAS SAKIP**

**TERUS MENDORONG  
UPAYA PENINGKATAN  
KUALITAS PENERAPAN  
SAKIP DI SELURUH UNIT  
KERJA MELALUI  
EVALUASI MAUPUN  
BIMBINGAN TEKNIS  
AKUNTABILITAS KINERJA**



# KEPATUHAN LHKPN PER 26/06/2019 90,72%

Sumber: <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>

INSTANSI	WAJIB LAPOR	PN/WL ONLINE	PN/WL OFFLINE	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	KEPATUHAN (%)
MAHKAMAH AGUNG	20.117	18.681	1.436	18.250	1.867	15.554	2.696	<b>90.72%</b>

- PENYELENGGARA NEGARA YANG TELAH PINDAH TUGAS DARI PENGADILAN A (LAMA) KE PENGADILAN B (BARU), NAMANYA TERTULIS PADA KEDUA PENGADILAN TERSEBUT, SEHINGGA PERSENTASE KEPATUHAN MENJADI RENDAH.



# MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENGHARGAAN BNN

*atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI pada hari Rabu, 26 Juni 2019.*



*“Intelektualitas tanpa integritas  
Bagai pelita di tangan pencuri  
Integritas tanpa intelektualitas  
Bagai pelita di tangan bayi,”*

**TERIMA KASIH**

**SUNARTO**

*Batam, 5-7 Juli 2019*